

Pemerintah-DPR Sepakat Selesai dalam 3 Bulan

Dari Halaman 1

Di tempat sama, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan rumah sakit tidak boleh menolak pasien, termasuk mereka dengan penyakit kronis yang membutuhkan perawatan berkelanjutan, seperti cuci darah.

"Saya rasa dalam rapat tadi Pak Menkes sudah sangat jelas juga. Jangan ada rumah sakit yang menolak pasien. Selama tiga bulan ke depan ini akan dijamin," kata Gus Ipul.

Penonaktifan sejumlah peserta BPJS PBI merupakan bagian dari transformasi data nasional yang mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. Seluruh penyaluran subsidi dan bantuan sosial, termasuk PBI JKN, wajib menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang terus dimutakhirkan.

Proses pemutakhiran dilakukan melalui usulan rutin pemerintah daerah, kemudian diverifikasi dan divalidasi sebelum ditetapkan alokasinya. Tahun lalu, lebih dari 13 juta peserta sempat dinonaktifkan, dengan sekitar 87 ribu peserta berhasil direaktivasi.

"Tahun ini diperkirakan sekitar 11 juta peserta akan dinonaktifkan, namun tetap tersedia mekan-

isme reaktivasi dan diharapkan prosesnya bisa lebih cepat," ujar Gus Ipul.

Gus Ipul menegaskan untuk peserta dengan penyakit kronis yang membutuhkan perawatan berkelanjutan, layanan tidak boleh terhenti, dan pembiayaannya tetap ditanggung pemerintah selama masa transisi.

"Untuk penyakit kronis yang membutuhkan perawatan berkelanjutan, otomatis tidak boleh ditolak oleh rumah sakit dan pembiayaannya dibiayai oleh pemerintah," tegasnya.

Gus Ipul juga menekankan alokasi PBI JKN tidak berubah, tetap sesuai ketentuan yang berlaku. Penyesuaian dilakukan dengan mengalihkan subsidi kepada kelompok yang lebih memenuhi kriteria, sementara pemerintah daerah memberikan dukungan melalui APBD, terutama di wilayah yang telah mencapai Universal Health Coverage (UHC).

Sebagian peserta yang dinonaktifkan beralih ke skema mandiri BPJS Kesehatan, menandakan adanya kelompok masyarakat yang mampu membiayai kepesertaannya sendiri.

"Yang penting dipahami, alokasi tidak berubah. Hanya dialihkan agar lebih tepat sasaran," ujarnya.

Masyarakat juga diajak ikut berpartisipasi dalam pemutakhiran data melalui kanal resmi,

rencana awal.

Sekitar 75 persen pembiayaan proyek tersebut berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB), sementara sisanya merupakan setoran modal para pemegang saham konsorsium.

Isu pembiayaan Whoosh kembali mencuat setelah Presiden Prabowo sebelumnya menyatakan pemerintah siap bertanggung jawab atas keberlanjutan proyek tersebut, termasuk kewajiban pembayaran sekitar Rp1,2 triliun per tahun.

Prabowo menilai proyek kereta cepat memiliki manfaat publik yang besar, mulai dari pengurangan kemacetan, polusi, hingga alih teknologi, sehingga tidak semata-mata dinilai dari untung dan rugi.

Namun, di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat menyampaikan sikap berbeda. Ia secara terbuka menyatakan tidak ingin APBN digunakan untuk membayar utang Whoosh.

mencapai sekitar Rp20 triliun. Hingga saat ini, realisasi penyaluran bansos telah melampaui Rp17 triliun.

"Sisanya akan menyusul untuk Januari, Februari, dan Maret. Artinya, insyaallah sampai Lebaran," ujar Gus Ipul.

Penyaluran selanjutnya dijadwalkan berlanjut pada kuartal kedua tahun ini, yakni April hingga Juni.

Gus Ipul menegaskan penerima bansos bersifat dinamis karena mengacu pada data tunggal yang terus dimutakhirkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

"Penerima manfaat itu sifatnya dinamis karena kita berpedoman kepada data tunggal yang dimutakhirkan secara berkelanjutan oleh BPS," kata Gus Ipul.

Dengan mekanisme ini, seseorang bisa men-

termasuk aplikasi cek bansos, pusat data, call center, dan WhatsApp. Partisipasi publik diharapkan dapat memastikan data penerima bantuan lebih tepat sasaran.

"Masyarakat luas boleh melakukan verifikasi, validasi, boleh melakukan usul melalui saluran yang kami buat diantaranya adalah aplikasi cek bansos di 021 171 untuk call center dan juga ada WA center. Jadi semuanya kita ajak untuk melakukan pemutakhiran," terangnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai penonaktifan jutaan peserta BPJS PBI sebagai masalah serius yang merugikan pemerintah, baik dari sisi anggaran maupun citra.

"Karena sedemikian besar orang yang terpengaruh dan mereka tidak tahu bahwa mereka sudah tidak masuk daftar lagi, sehingga kerasa itu 10 persen, kalau 1 persen gak ribut orang-orang" ujar Purbaya.

Menurutnya, penonaktifan peserta PBI secara massal memang seharusnya dilakukan bertahap, misalnya melalui mekanisme transisi selama tiga hingga lima bulan, agar masyarakat tidak terkejut.

"Ini yang musti dikendalikan ke depan. Kalau angkanya sedrastis begini ya di-smoothing sedikit lah, di average 3-5 bulan, terserah. Tapi, jangan menimbulkan kejutan seperti itu," ujar Purbaya. (cnni/js)

"Kalau saya, mending enggak bayar (utang Whoosh) saya. Cuma gini, itu kan ada kebijakan pimpinan di atas, Presiden dan lain-lain, diskusi," ujar Purbaya dalam media briefing.

Purbaya menegaskan hingga saat itu belum ada keputusan final terkait pembagian peran antara pemerintah dan Danantara dalam restrukturisasi utang Whoosh. Ia menyebut pemerintah cenderung menangani aspek infrastruktur, sementara Danantara akan menanggung bagian operasional dan rolling stock.

"Sepertinya ini belum putus juga," ujarnya saat itu.

Sejalan dengan itu, COO Danantara Dony Oskaria menyatakan Danantara dan pemerintah akan berbagi peran dalam proses restrukturisasi keuangan proyek kereta cepat, sesuai arahan Presiden. Pemerintah disebut akan menangani kewajiban yang terkait dengan infrastruktur, sementara Danantara fokus pada optimalisasi operasional layanan.(cnni/js)

erima bansos di satu kuartal dan tidak di kuartal berikutnya, atau sebaliknya.

Dalam proses penyaluran, Kemensos menggunakan berbagai kanal, termasuk pembukaan rekening dan distribusi melalui PT Pos Indonesia.

Pemerintah juga membuka partisipasi publik untuk pemutakhiran data melalui jalur formal di tingkat RT/RW hingga pemerintah daerah, serta jalur partisipasi masyarakat melalui call center, WhatsApp center, dan aplikasi Cek Bansos.

Gus Ipul menambahkan hasil verifikasi dan validasi data akan diperingkatkan ke dalam desil kesejahteraan. Fokus utama bantuan diarahkan kepada kelompok paling rentan.

"Fokus kita nanti adalah bantuan pada desil 1 dan 2. Jika alokasi anggarannya masih ada, akan kita tingkatkan sampai desil 3 dan 4," ujarnya. (cnni/js)

Memanas, Massa AMI

Dari Halaman 1

pengamanan ketat. "Bagaimana mungkin sebuah instansi yang dijaga oleh petugas berseragam dan dilengkapi kamera pengawas bisa kebobolan jika tidak ada oknum petugas yang 'bermain mata'?" tegas Baihaki di sela-sela orasinya.

Mengatasi tekanan massa, pihak Kanwil Ditjen PAS Jawa Timur akhirnya menemui para demonstran. Perwakilan kantor wilayah meminta sepuluh orang perwakilan dari massa AMI untuk masuk dan melakukan audiensi secara langsung guna menyampaikan tuntutan mereka.

Efendi, selaku perwakilan dari Kanwil Kemenkumham Jatim, menyambut baik masukan yang diberikan oleh massa aksi. Ia menyampaikan apresiasiinya terhadap peran aktif organisasi masyarakat dalam mengawasi kinerja pemerintah.

"Kami berterima kasih kepada Aliansi Madura Indonesia (AMI) sebagai wadah organisasi yang bergerak sebagai kontrol sosial. Masukan ini akan menjadi bahan evaluasi kami ke depannya," ujar Efendi saat ditemui perwakilan massa.

Aksi yang berlangsung dengan tertib namun penuh semangat ini menuntut adanya tindakan tegas terhadap petugas oknum yang terbukti lalai atau terlibat dalam praktik ilegal di Lapas. AMI mengancam akan kembali melakukan aksi serupa dengan massa yang lebih besar jika tidak ada perubahan signifikan dalam pengawasan penjara di Jawa Timur. (mj/js)

KPK Geledah Kantor

Dari Halaman 1

US\$50 ribu," kata dia. "Selanjutnya penyidik akan menganalisis temuan dalam pengeledahan ini untuk menguatkan bukti-bukti yang didapat dalam peristiwa tangkap tangan pekan lalu," katanya.

KPK menetapkan Ketua PN Depok I Wayan Eka Mariarta, Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan, dan Jurusita di PN Depok Yohansyah Maruanaya sebagai tersangka penerima suap terkait pengurusan sengketa lahan.

Sedangkan Direktur Utama PT Karabha Digdaya (KD) Trisnadi Yulrisman dan Head Corporate Legal PT KD Berliana Tri Kusuma ditetapkan KPK sebagai tersangka pemberi suap.

Para tersangka disangkakan telah melanggar Pasal 605 huruf a dan/atau Pasal 606 angka (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Teruntut Bambang Setyawan, KPK juga menjerat yang bersangkutan dengan delik gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 B UU Tipikor.

KPK telah menahan lima orang tersangka tersebut selama 20 hari pertama sejak 6 sampai dengan 25 Februari 2025 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

"Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 101 KUHP 2026, KPK juga telah mengirimkan surat kepada Mahkamah Agung terkait dengan penahanan yang dilakukan terhadap seorang hakim," kata Pelaksana Tugas Deputy Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam jumpa pers di Kantornya, Jakarta, Jumat (6/2) malam.(cnni/js)

Hidayah Taruhan Golkar Sumut 2029

Dari Halaman 1

elektoral, saya merasa perlu mengirimkan early warning serius ke DPP Golkar di Slipi, Jakarta. Kesalahan membaca fase pasca-Musda bukan sekadar kekeliruan administratif, melainkan bisa berujung pada kegagalan struktural menuju Pemilu 2029.

Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, kini berada pada persimpangan strategis. Visi besar kepemimpinannya hanya akan menjadi slogan jika tidak ditopang oleh arsitektur organisasi yang presisi di daerah. Penentuan Sekretaris DPD Golkar Sumut bukan jabatan pelengkap, melainkan kingmaker position yang menentukan hidup-matinya mesin partai.

Berdasarkan pemetaan big data elektoral, rekam jejak politik, dan analisis konflik laten pasca-Musda, sains politik mengarah pada satu kesimpulan tegas:

Sekretaris DPD Golkar Sumut harus diambil dari klaster "Segitiga Emas".

Di luar itu, Golkar sedang mempertaruhkan masa depannya sendiri.

Pertama, aksioma komplementer wilayah. Andar Amin Harahap adalah figur dominan di Tapanuli Bagian Selatan. Namun Sumatera Utara bukan satu wajah. Lum-bung suara terbesar Golkar secara konsisten berada di kawasan Pantai Timur. Dalam konteks ini, Erni Ariyanti Sitorus bukan sekadar politisi perempuan, melainkan fenomena elektoral. Perolehan 114.492 suara sah pribadi adalah data keras yang tidak bisa dipatahkan oleh opini. Mengabaikan Erni sama dengan membuang potensi peningkatan kursi legislatif secara signifikan. Ini bukan soal kedekatan personal, melainkan scientific vote-getting.

Kedua, prinsip memori institusional. Partai modern tidak cukup digerakkan oleh karisma, tetapi oleh stabilitas teknokratis. Rolel memiliki pengalaman lintas level dari kepemudaan, eksekutif daerah, legislatif, hingga struktur partai. Dalam konteks kesibukan Andar di pusat, Rolel adalah jaminan bahwa mesin organisasi tetap hidup, rapi, dan bekerja tanpa jeda. Ia adalah institutional memory Golkar Sumut yang tak tergantikan.

Ketiga, penguasaan medan senyap pemilu. Irahm Buana Nasution menawarkan keunggulan strategis yang jarang dimiliki politisi lain. Pengalamannya memimpin KPU memberinya perspektif "sinar-X" terhadap regulasi, celah konflik, dan potensi sengketa pemilu. Latar belakang advokasinya menjadikan Golkar tidak hanya siap bertarung, tetapi juga siap bertahan secara hukum. Menempatkan Irahm sebagai Sekretaris sama dengan memasang sistem pertahanan dini bagi partai.

Inilah yang saya sebut sebagai rumus Andar-Plus.

Bukan kompromi elite, melainkan formulasi rasional berbasis data.

Bahlil Lahadalia dikenal sebagai pemimpin yang menghargai kinerja, bukan bisikan. Maka pesan ini seharusnya terbaca jelas: memaksakan figur titipan yang minim akar sosial atau tidak kompatibel secara sosiologis dengan Andar hanya akan memicu disharmoni elite dan apatisme akar rumput.

Rumus politiknya sederhana, namun menentukan: Andar + (Erni / Rolel / Irahm) = Dominasi Golkar Sumut 2029.

Di luar itu, Golkar harus siap menghadapi stagnasi atau lebih buruk, erosi kekuasaan secara perlahan.

Istana Pastikan Dibayar Pakai APBN

Dari Halaman 1

but saat ini masih berada dalam tahap negosiasi dan pembicaraan teknis lanjutan.

"Belum (final), kemarin laporan terakhir rapat di Danantara, jadi masih ada finalisasi. Sekarang proses negosiasi atau pembicaraan teknisnya itu langsung dipimpin oleh Pak Rosan (Roeslani) sebagai CEO Danantara," tambah Prasetyo.

Pernyataan Prasetyo ini merespons pernyataan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Bobby Rasyidin yang menyebut persoalan utang proyek kereta cepat telah memperoleh solusi dan jaminan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh dibangun dengan total nilai investasi sekitar US\$7,2 miliar termasuk pembengkakan biaya (cost overrun) sekitar US\$1,21 miliar dari

Jelang Lebaran Pemerintah Kucurkan Bansos

Dari Halaman 1

sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang menysar 18 juta keluarga penerima manfaat dengan anggaran sebesar Rp17,5 triliun," ujarnya dalam konferensi pers di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/2).

Selain bansos reguler, Kemensos juga menyalurkan bansos adaptif untuk penanganan kebencanaan.

"Kedua adalah bansos adaptif, termasuk untuk kebencanaan di Sumatera dan beberapa wilayah lain, dengan nilai lebih dari Rp2,3 triliun," kata Gus Ipul.

Di luar itu, Kemensos turut mengalokasikan anggaran bansos atensi atau asistensi rehabilitasi sosial sehingga total anggaran bansos tahun ini

Roy Suryo Cs Bakal Hadirkan Bonatua Silalahi

Dari Halaman 1

so-called aslinya haruslah mirroring dengan yang dapat ditunjukkan pada tanggal 15 Desember 2025 di gelar perkara khusus Polda Metro Jaya. Empat hal itu harus konsisten," tutur dia.

Menurut Refly, salinan ijazah yang diperoleh Bonatua itu serupa dengan apa yang pernah diunggah oleh Kader PSI, Dian Sandi. Jika benar demikian, kata dia, maka apa yang dilakukan oleh Roy cs bukanlah sebuah kesalahan.

"Nah, karena sama maka kemudian apa yang dilakukan penelitian oleh Roy Suryo, Rismon Sianipar dan Dr. Tifa maka itu confirm. Jadi walaupun misalnya mereka mengklaim bahwa yang dikaji atau diteliti RRT itu bukan ijazah so-called aslinya, karena yang dikatakan so-called asli itu adalah yang ditampakkan di gelar perkara khusus, maka kalau itu ijazahnya maka sama kesimpulannya 99,9 persen palsu," tutur dia.

"Nah, jadi apa yang didapatkan Bonatua ini memperkuat bahwa apa yang diteliti Roy Suryo, Rismon Sianipar dan Tifauzia Tyassuma adalah barang yang diserahkan pada waktu pendaftaran sebagai Presiden 2014 dan 2019, dan itu menurut penelitian, hasil penelitian sekali lagi itu palsu. 99,9 persen palsu, kata Roy Suryo," sambungnya.

Sebelumnya, pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi resmi mendapat salinan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) tanpa sensor dari KPU RI, Senin (9/2).

Setelah melalui proses sengketa di Komisi In-



formasi Pusat (KIP), Bonatua juga mengapresiasi langkah KPU RI yang bersedia menyerahkan dokumen tanpa sensor tersebut.

"Terima kasih KPU. Artinya memang ini buktinya bahwa tak sempat saya simpan ini selalu langsung saya kasih ke publik. Nah, dengan begitu ya mengapa inti acara kita ini adalah menerima salinan resmi fotokopi ijazah, ini saya catat ya, fotokopi ijazah terlegalisir berwarna tanpa sensor," kata Bonatua saat dikonfirmasi, Selasa (10/2).

peningkatan kepesertaan aktif dan menjaga keberlanjutan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) terdapat lebih dari 54 juta jiwa pada desil 1 hingga 5 (kelompok masyarakat paling miskin) yang belum menerima PBI JKN.

Sebaliknya, sekitar 15 juta jiwa pada desil 6 sampai 10 masih tercatat sebagai penerima.

"Tidak ada yang dikurangi, tapi direlokasi. Kita alihkan kepada mereka yang lebih memenuhi kriteria sesuai alokasi yang kita miliki," kata Gus Ipul, melansir keterangan resmi di laman Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Senin (9/2).

Melalui realokasi bertahap sejak April 2025 hingga Januari 2026, inclusion error dan exclusion error disebut mengalami penurunan signifikan.

Inclusion error adalah penerima yang se-

harusnya tidak berhak namun menerima bantuan, sedangkan exclusion error adalah mereka yang berhak tetapi belum menerima.

Dalam proses tersebut, Kemensos menonaktifkan 13,5 juta peserta PBI JKN pada 2025. Dari jumlah itu, sebanyak 87.591 peserta mengajukan reaktivasi.

Sebagian peserta yang dinonaktifkan juga beralih menjadi peserta mandiri BPJS Kesehatan. Selain itu, ada pula yang pembiayaannya diambil alih pemerintah daerah, khususnya di wilayah yang telah mencapai Universal Health Coverage (UHC), sehingga seluruh warganya dijamin melalui APBD.

"Artinya penonaktifan ini tepat. Mereka yang mampu beralih menjadi mandiri atau ditanggung pemerintah daerah," jelasnya.

Meski dilakukan penonaktifan, Kemensos tetap membuka mekanisme reaktivasi bagi warga yang masih layak menerima PBI JKN. Proses reaktivasi dilakukan melalui verifikasi tingkat kesejahteraan oleh dinas sosial daerah.(cnni/js)